

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Pada tahun 2015, Konsep Millenium Development Goals (MDGs) telah resmi digantikan dengan konsep Sustainable Development Goals (SDGs) (Reddy, 2016). Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) telah disahkan menjadi sebuah agenda global saat pertemuan Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) diadakan (Tustiriati, 2016). Konsep SDGs menjadi solusi akan permasalahan berbagai isu yang ada di dunia. SDGs merupakan seperangkat program dan target yang memiliki maksud dan tujuan untuk pembangunan global di masa mendatang. SDGs merupakan sebuah kesepakatan pembangunan negara-negara di seluruh Negara maju dan berkembang (Siregar, 2018). SDGs mempunyai 5 prinsip pondasi yaitu, 1) Manusia, 2) Planet, 3) Kesejahteraan, 4) Perdamaian, dan 5) Kemitraan. Kelima prinsip tersebut melingkupi 17 tujuan dan 169 target SDGs yang saling terhubung untuk mengakhiri kemiskinan, mencapai kesetaraan, dan mengatasi perubahan iklim pada tahun 2030 (Ramadhani, 2020).

Salah satu prinsip utama yang digunakan oleh SDGs adalah prinsip “*No One Left Behind*”. Prinsip ini ingin menekankan bahwa manfaat pembangunan berkelanjutan harus dirasakan oleh seluruh masyarakat dunia, terutama yang termarginalkan (Reddy, 2016). Untuk mewujudkan prinsip utama ini, diperlukan melokalisasikan SDGs pada berbagai daerah di seluruh negara yang ada di dunia. Menerapkan SDGs pada tingkat lokal merupakan hal yang krusial dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Oosterhof, 2018). Penerapan SDGs pada tingkat lokal sering diabaikan dalam proses perencanaan tujuan pembangunan (Oosterhof, 2018). Lokalisasi SDGs didefinisikan sebagai proses mendefinisikan, menerapkan, dan memantau strategi pada tingkat lokal untuk mencapai agenda global dan nasional (Oosterhof, 2018). Berbagai Negara yang ada di dunia telah mencoba menerapkan lokalisasi SDGs pada masing-masing

daerahnya, salah satunya Indonesia. Berdasarkan *Sustainable Development Report 2021*, pencapaian SDGs Indonesia berada pada tingkat 82 dari 163 Negara dengan poin 69.16. Posisi tersebut dapat dikatakan cukup rendah dari poin target 100 untuk kawasan Negara di kawasan Asia Tenggara (Oktaviani, 2022). Data ini menunjukkan bahwa manfaat dari keseluruhan SDGs belum dirasakan oleh seluruh Indonesia. Demi keberhasilan lokalisasi SDGs, dibutuhkan kolaborasi dari seluruh *stakeholders*, yaitu salah satunya peran penting dari Pemerintah Kota dan Daerah (Pratiwi & Sriwartini, 2020).

Proses penerapan dan penerjemahan konsep SDGs pada level lokal membutuhkan peran dari pihak Pemerintah Daerah/Kabupaten, mereka dianggap memegang peran yang krusial dalam proses pencapaian SDGs. Mereka adalah pihak yang mempunyai kedekatan dengan masyarakatnya, sehingga mereka dapat memahami apa saja yang menjadi kebutuhan dari masyarakat sekitarnya. Peranan mereka dalam penerapan melokalisasi SDGs ialah melakukan lokalisasi strategi dengan menggunakan berbagai mekanisme yang sesuai demi menerjemahkan tujuan agenda pembangunan pada level lokal daerahnya masing-masing (Ramadhani, 2020).

Namun, pada nyatanya dalam proses penerjemahan informasi konsep SDGs di berbagai daerah merupakan hal yang tidak mudah (Perry, Diprose, Buck, & Simon, 2021). Dalam proses melokalisasi, diperlukan proses waktu dalam penerjemahan makna konsep SDGs. Diperlukan sistem integrasi informasi yang mampu untuk menyeimbangkan konsep sehingga tumbuhnya kesadaran terhadap pentingnya penerapan SDGs pada tingkat lokal (Perry, Diprose, Buck, & Simon, 2021). Pelaksanaan SDGs di Indonesia memiliki tantangan, yaitu terdapat hambatan komunikasi yang dilakukan dalam pengadopsian konsep pada masing-masing daerah yang beragam.

Hal ini dikarenakan konsep SDGs bukanlah hal yang sederhana, melainkan rumit. Konsep yang rumit menyebabkan proses penerjemahan menjadi hal yang sulit dan membutuhkan waktu yang lama (Pratiwi & Sriwartini, 2020). Konsep yang rumit ini membuat kesadaran terhadap pentingnya penerapan SDGs pada

level lokal menjadi rendah sehingga terjadi pembangunan berkelanjutan tidak merata (Perry, Diprose, Buck, & Simon, 2021). Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan tata kelola pemerintahan daerah yang baik. Tata kelola pemerintahan daerah yang mampu untuk menerjemahkan konsep SDGs melalui pembangunan kebijakan berkelanjutan sesuai dengan keadaan masing-masing (Oosterhof, 2018). Tata kelola pemerintahan daerah yang baik ialah praktek pengelolaan pemerintahan daerah dalam menyediakan layanan dan fasilitas terhadap masyarakat daerah sekitarnya (Bello & Dola, 2014). Selain itu, tata kelola pemerintahan daerah yang baik mampu untuk mendorong keterlibatan pemangku kepentingan lokal dan menciptakan komitmen yang kuat untuk pencapaian SDGs pada tingkat lokal (Oosterhof, 2018). Tata kelola pemerintahan daerah yang baik mampu untuk mendorong terjadinya pembangunan berkelanjutan di berbagai wilayah (Oosterhof, 2018).

Untuk menciptakan dan pemberdayaan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, diperlukan unsur komunikasi (The Communication Initiative Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) The World Bank, 2007). Komunikasi efektif memegang peran yang krusial dalam membangun tata kelola pemerintahan daerah yang dan pembangunan berkelanjutan. Komunikasi efektif memegang peran yang krusial dalam mempromosikan tata kelola pemerintahan daerah yang baik (Okwechime, 2015).

Seperti yang disebutkan di atas, tata kelola pemerintahan yang baik memungkinkan terjadinya adanya diskusi dan transfer pengetahuan dalam pembangunan. Melalui komunikasi yang efektif, memungkinkan terjadinya transfer pengetahuan tentang konsep dan pemberdayaan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang baik dengan masyarakatnya (Okwechime, 2015). Komunikasi pembangunan berkelanjutan merupakan dialog komunikasi yang efektif. Komunikasi pembangunan berkelanjutan merupakan pendekatan komunikasi yang mampu untuk memfasilitasi pemahaman bersama dan saling percaya. Komunikasi pembangunan berkelanjutan adalah komunikasi yang berusaha untuk memahami realitas para *stakeholders* nya (Arifin, 2020).

Melalui komunikasi pembangunan yang berkelanjutan, komunikator dapat mewakili suara mereka yang terpinggirkan melalui pembuatan program dan kebijakan-kebijakan yang sesuai (The Communication Initiative Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) The World Bank, 2007).

Penelitian ini akan mengambil studi kasus dari sebuah organisasi internasional yang ikut menyukseskan pembangunan berkelanjutan melalui pemberdayaan dan peningkatan kapasitas pemerintahan daerah. Organisasi internasional tersebut ialah United Cities and Local Governments (UCLG) yang mempunyai beberapa pembagian wilayah sesuai wilayah, salah satunya Asia Pasifik yaitu United Cities and Local Governments Asia Pacific (UCLG ASPAC). Salah satu peran utama yang dilakukan oleh UCLG ASPAC adalah advokasi. UCLG ASPAC berusaha untuk memobilisasi para pemimpin kota dan publik untuk bergerak ke arah berkelanjutan melalui berbagai program (UCLG ASPAC, 2022).

UCLG ASPAC berusaha untuk menjadi pengembangan pengetahuan tentang isu pemerintahan daerah di Asia Pasifik (UCLG ASPAC, 2023). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi komunikasi pembangunan berkelanjutan apa yang dapat dilakukan dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik demi tercapainya pembangunan berkelanjutan yang merata di seluruh daerah Indonesia. Penelitian ini akan menggunakan studi kasus melalui UCLG ASPAC.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan *Sustainable Development Report 2021*, pencapaian SDGs Indonesia berada pada tingkat 82 dari 163 Negara dengan poin 69.16. Posisi tersebut dapat dikatakan cukup rendah dari poin target 100 untuk kawasan Negara di kawasan Asia Tenggara (Oktaviani, 2022). Demi terwujudnya SDGs yang merata di Indonesia, diperlukan peran dari Pemerintah Daerah. Mereka berperan untuk melokalisasikan SDGs sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing (Ramadhani, 2020). Namun, terdapat hambatan komunikasi dalam proses melokalisasikan SDGs yaitu proses pengadopsian konsep pada daerah masing-

masing (Pratiwi & Sriwartini, 2020). Hal ini dikarenakan SDGs merupakan hal yang kompleks. Konsep yang rumit menyebabkan proses penerjemahan menjadi hal yang sulit dan membutuhkan waktu yang lama. Konsep yang rumit ini membuat kesadaran terhadap pentingnya SDGs (Perry, Diprose, Buck, & Simon, 2021). Demi terciptanya kesadaran dan pemahaman terkait SDGs, diperlukan tata kelola pemerintahan daerah yang baik (Dhaoui & Iyad, 2019). Tata kelola pemerintahan daerah yang baik ialah tata kelola pemerintahan yang mampu untuk memfasilitasi adanya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan. Dalam membangun tata kelola pemerintahan daerah yang baik, diperlukan adanya peningkatan pemberdayaan kapasitas Pemerintah Daerah yaitu melalui strategi komunikasi pembangunan berkelanjutan (Arifin, 2020). Strategi komunikasi pembangunan berkelanjutan mampu memfasilitasi dialog komunikasi antara pihak untuk saling memahami dan pengertian (Technische, 2006). Berdasarkan pernyataan di atas, maka rumusan penelitian ini ialah mengetahui strategi komunikasi pembangunan berkelanjutan yang dapat dilakukan dalam pemberdayaan tata kelola pemerintahan daerah yang baik untuk tercapainya pembangunan berkelanjutan yang merata di Indonesia dengan mengambil studi kasus pada UCLG ASPAC.

### **1.3 Pertanyaan Penelitian**

Bagaimana strategi komunikasi pembangunan yang dapat dilakukan oleh UCLG ASPAC dalam memberdayakan dan mempromosikan tata kelola pemerintahan daerah yang baik?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pernyataan diatas, tujuan yang ingin dicapai oleh penelitian ini adalah mengetahui bagaimana strategi komunikasi yang dilakukan oleh UCLG ASPAC dalam menciptakan tata kelola pemerintahan Daerah yang baik di Indonesia?

## **1.5 Kegunaan Penelitian**

### **1.5.1 Kegunaan Akademis**

Penelitian ini berfokus pada strategi komunikasi pembangunan berkelanjutan dalam memberdayakan tata kelola pemerintahan daerah yang baik demi tercapainya pembangunan yang berkelanjutan pada level lokal. Peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi referensi atau acuan peneliti selanjutnya dalam meneliti topik strategi komunikasi pembangunan berkelanjutan pada level lokal.

### **1.5.2 Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi pemerintahan daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan daerah yang baik demi terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang merata di Indonesia.

### **1.5.3 Kegunaan Sosial**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan baru tentang strategi komunikasi yang dapat dilakukan dan pentingnya peran pemerintah daerah dalam usaha pencapaian pembangunan yang berkelanjutan di level lokal.

## **1.6 Keterbatasan Penelitian**

Keterbatasan penelitian ini ialah hanya merepresentasikan pengetahuan mengenai strategi komunikasi pembangunan berkelanjutan dari satu pihak saja yaitu UCLG ASPAC. Hal ini membatasi hasil penelitian yang hanya mampu merepresentasikan pemahaman strategi komunikasi pembangunan berkelanjutan.